

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan tersebut adalah sektor pertanian. Pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam penyediaan lapangan kerja, sumber devisa negara, serta penopang perekonomian masyarakat desa. Di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks, sektor pertanian menghadapi tantangan besar, seperti alih fungsi lahan, keterbatasan akses teknologi, perubahan iklim, serta menurunnya minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat pedesaan menjadi aspek yang sangat penting.

Dalam konteks pembangunan pedesaan, peran perempuan memiliki posisi yang tidak dapat diabaikan. Perempuan tidak hanya berkontribusi dalam urusan domestik rumah tangga, tetapi juga aktif dalam kegiatan ekonomi produktif, termasuk di bidang pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase tenaga kerja perempuan di sektor pertanian cukup tinggi, baik dalam kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, maupun pascapanen. Namun, kontribusi perempuan sering kali kurang terlihat secara formal, karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi, modal, serta ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan. Padahal, pemberdayaan perempuan di bidang pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga, memperkuat perekonomian rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan pembangunan desa.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pertanian adalah melalui pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT). KWT merupakan kelembagaan masyarakat yang anggotanya terdiri dari perempuan-

perempuan desa yang memiliki kepedulian terhadap kegiatan pertanian. KWT berfungsi sebagai wadah belajar, bekerja sama, dan berorganisasi bagi perempuan, sekaligus menjadi media untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, serta penguatan jaringan pemasaran. Melalui program KWT, perempuan diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan, mengembangkan usaha tani ramah lingkungan, mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Secara konseptual, keberadaan KWT selaras dengan paradigma pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Program-program KWT juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-1 (tanpa kemiskinan), tujuan ke-2 (tanpa kelaparan), tujuan ke-5 (kesetaraan gender), dan tujuan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi). Dengan demikian, implementasi KWT memiliki arti strategis, baik dari perspektif pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan berkelanjutan.

Selain potensi lokal, implementasi KWT juga tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, KWT diposisikan sebagai bagian dari kelembagaan petani yang memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian. Kebijakan ini menegaskan bahwa perempuan perlu diberi ruang untuk berperan aktif dalam kegiatan pertanian agar tercapai kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman juga memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sinergis dengan kegiatan KWT, seperti program ketahanan pangan keluarga, pelatihan keterampilan, serta pendampingan UMKM berbasis pertanian.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, jumlah KWT terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya minat dan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, untuk bergabung dalam kelompok yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial. Namun demikian, perkembangan kuantitatif tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas kelembagaan yang kuat. Masih terdapat KWT yang aktivitasnya stagnan, keterbatasan akses modal dan teknologi, serta kurangnya inovasi dalam mengembangkan usaha. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana implementasi program KWT dijalankan secara nyata, termasuk di Desa Wedomartani.

Kabupaten Sleman sebagai salah satu lumbung pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Wilayah ini dikenal dengan tanahnya yang subur, didukung oleh sistem irigasi yang memadai, serta masyarakat yang masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Berbagai komoditas unggulan, seperti padi, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman hias, banyak dikembangkan di Sleman. Untuk mendukung potensi tersebut, pemerintah daerah bersama masyarakat menginisiasi pembentukan berbagai kelembagaan pertanian, termasuk KWT. Hingga saat ini, KWT di Kabupaten Sleman telah berkembang cukup pesat, baik dari segi jumlah maupun variasi kegiatan yang dijalankan.

Salah satu desa yang memiliki KWT aktif adalah Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Desa ini memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan kondisi geografis yang mendukung kegiatan pertanian. Masyarakat Wedomartani sebagian besar masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama, meskipun perkembangan sektor non-pertanian juga mulai tumbuh. Potensi lahan pekarangan yang luas, dukungan sosial budaya

yang kuat, serta adanya perhatian dari pemerintah desa menjadikan Wedomartani sebagai lokasi yang strategis untuk pengembangan KWT.

Implementasi program KWT di Desa Wedomartani meliputi berbagai kegiatan, antara lain pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan dan hortikultura, pelatihan pengolahan hasil pertanian, pengembangan usaha mikro berbasis produk lokal, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan tersebut, KWT diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan keluarga, menambah pendapatan rumah tangga, serta memperkuat solidaritas sosial antaranggota. Akan tetapi, pelaksanaan program di lapangan sering kali menemui kendala, seperti keterbatasan modal usaha, kurangnya keterampilan manajerial, rendahnya literasi digital untuk pemasaran produk, serta ketidakmerataan partisipasi anggota. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana implementasi program KWT di Wedomartani dapat berjalan efektif sesuai tujuan yang diharapkan.

Di sisi lain, keberadaan KWT membawa dampak positif yang tidak dapat dipungkiri. Selain sebagai wadah pemberdayaan ekonomi, KWT juga berperan dalam memperkuat peran sosial perempuan di masyarakat. Melalui berbagai kegiatan, anggota KWT memperoleh pengalaman berorganisasi, membangun jejaring, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam berkontribusi pada pembangunan desa. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi program KWT di Desa Wedomartani menjadi relevan untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program kelompok Wanita tani (KWT) di Desa Wedomartani Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kelompok Wanita tani (KWT) di Desa Wedomartani Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang implementasi kelompok Wanita tani (KWT) Di Desa Wedomartani Kabupaten Sleman.
2. Masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau literatur dan tambahan pengetahuan mengenai implementasi kelompok Wanita tani (KWT).
3. Kelompok wanita tani (KWT), hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi untuk kelompok tani.